

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partai politik memiliki peran dalam demokrasi, peranan dari partai politik merupakan sebuah peranan yang penting. Di Indonesia, perkembangan partai politik memiliki sejarah hingga akhirnya dapat berpengaruh pada perkembangan demokrasi. Partai politik merupakan sebuah gambaran dari rakyat. Partai politik merupakan sebuah cerminan dari partisipasi yang dilakukan oleh rakyat. Partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai sejak kemerdekaan. Ciri dari kehidupan partai politik ini diawali dengan banyaknya partai politik (multiparti).

Adapun, partai politik memiliki fungsi untuk mencari serta mengajak seseorang dengan bakat untuk bergabung kedalam kegiatan partai. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan seorang anggota pada partai politik tersebut. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat inilah kemudian partai politik dapat memperluas jaringannya dan mampu menarik berbagai golongan untuk bergabung menjadi anggota partai. Untuk menjadi anggota partai tidak menutup kemungkinan golongan muda yang bergabung sebagai kader partai.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politik yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan

pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik dapat melakukan tugas ini, perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik<sup>1</sup>.

Ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwa setiap partai politik diharuskan memiliki mekanisme rekrutmen politik sesuai dengan AD dan ART partai politik. Dalam perkembangannya, partai politik dalam melakukan mekanisme rekrutmen politik menggunakan organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap partai ini biasanya menjalankan fungsinya sebagai media penghubung partai dalam melakukan rekrutmen kader-kader baru dan menjalankan aktivitas partai yang berhubungan dengan kepemudaan<sup>2</sup>.

Sistem rekrutmen melakukan seleksi dengan kesesuaian antar karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Selain merekrut, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem ini akan dimuat transfer pengetahuan politik<sup>3</sup>.

Penarikan kader partai dilakukan sebagai sebuah cara atau sarana untuk memperluas basis dari sebuah partai politik. Dengan perluasan basis partai politik mampu memberikan kemudahan partai dalam memperoleh suara pada pemilihan.

---

<sup>1</sup> Firmansyah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2018, hal.163

<sup>2</sup> Wijayanti & Iswandi. *Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia*, Yogyakarta : SASI, Vol 27 No 4, 2021, hal. 483

<sup>3</sup> Firmansyah, Op Cit, hal. 70

Selain itu, penarikan kader melalui sayap politik memberikan beberapa keuntungan serta kemudahan daripada penarikan kader tanpa mengguakan organisasi sayap politik. Sayap partai politik akan melakukan penarikan kader mendekati masa pemilu<sup>4</sup>.

Kader baru partai politik memerlukan organisasi sayap politik dikarenakan sayap politik merupakan sebuah media pendidikan dan juga pelatihan yang diperlukan para kader. Kader dirasa lebih siap dan mampu untuk terjun ke dunia politik setelah melalui pendidikan dan pelatihan dari organisasi sayap politik. Organisasi sayap politik perlu adanya penguatan agar memberikan sebuah sistem baru dalam kaderisasi para kader partai yang menjadikan para kader berkualitas dan juga dapat diandalkan karena telah melalui pendidikan dari organisasi sayap partai politik. Tentunya hal ini akan memeberikan hal baik untuk Indonesia yaitu dengan tercipta dan terbentuknya calon pemimpin yang memiliki kualitas<sup>5</sup>.

Proses rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden sampai anggota DPRD, sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau propaganda<sup>6</sup>. Sehubungan dengan itu, Almond dan Powel mengatakan bahwa partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berbakat atau orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu dan kemudian

---

<sup>4</sup> Wijayanti & Iswandi, Op Cit, hal.488

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 488

<sup>6</sup> Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 211

memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan dan tuntutan partai politik yang bersangkutan<sup>7</sup>.

Organisasi sayap partai memiliki peranan yang penting bagi partai politik. Organisasi sayap politik berperan dalam menjalankan visi dan misi partai. Partai dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berfokus pada kader ataupun pengurus, melainkan perlu adanya fokus pada kader di organisasi sayap politik. Dengan fokus partai politik kepada organisasi sayap diharapkan memberikan dampak berupa adanya calon kader yang unggul dan berkualitas. Salah satu cara yang dilakukan organisasi sayap adalah dengan internalisasi ideology. Hal ini merupakan sebuah cara yang lebih sederhana daripada menggunakan cara penarikan kader atau rekrutmen<sup>8</sup>.

Pada organisasi sayap, partai memberikan pendidikan pada calon kader tersebut. Ketika kader dirasa sudah siap dan mampu untuk bergabung maka partai akan dapat dengan mudah melakukan pengembangan berdasarkan dari kualitas kader yang telah diberikan pendidikan maupun pelatihan sebelumnya. Hal ini akan menguntungkan partai agar tetap eksis untuk dipercaya oleh masyarakat dan memberikan sumbangsih pada demokrasi Indonesia<sup>9</sup>.

PDI-P memiliki beberapa organ sayap untuk mendukung pergerakan partai seperti Banteng Muda Indonesia (BMI), Taruna Merah Putih (TMP), Relawan

---

<sup>7</sup> Almond & Powell, *Comperative Politics : System, Process, and Policy*, Bonton Toronto, Little Brown and Company, 1978, hal. 108

<sup>8</sup> Wijayanti & Iswandi. *Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia*, Yogyakarta : SASI, Vol 27 No 4, 2021, hal. 491

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 491

Indonesia untuk Pro-Demokrasi (Repdem) dan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)<sup>10</sup>.

Banteng Muda Indonesia (BMI) merupakan organisasi sayap Partai PDI Perjuangan sesuai dengan Ketetapan DPP PDI Perjuangan No: 034/TAP/DPP/XII/2006 tentang Banteng Muda Indonesia sebagai Sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam AD/ART BMI pasal 11 tentang fungsi organisasi yaitu sarana perekrutan dan pembinaan kader bangsa yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa , jaringan aspiratif generasi muda, alat perjuangan kaum muda PDI Perjuangan dalam rangka menjalankan visi dan misi partai bagi kepentingan Rakyat<sup>11</sup>

Keterlibatan Banteng Muda Indonesia (BMI) dalam pesta demokrasi Indonesia dapat terlibat dari *positioning* aktor politiknya. Ada beberapa tokoh yang tercatat memiliki pengalaman organisasi di BMI yang akhirnya menjabat menggunakan wajah DPR dan DPP 2009-2014 seperti Eriko Sotardagu Ketua DPP BMI 2006-2010, Said Abdullah Bendahara Umum DPP BMI, Ir Nazarudin Kiemas, MM Penasihat Penggagas BMI sejak tahun 2000 yang mana karir legislatifnya tercatat dari tahun 1999-2009 sebagai anggota DPR RI dari PDIP<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Aminuddin, M Faisha, *Politik Mantan Serdadu Purnawirawan Dalam Politik Indonesia 1998-2014*, Surabaya : Airlangga Univesity Press, 2019. hal. 114

<sup>11</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Banteng Muda Indonesia, hal. 2

<sup>12</sup> Tim Litbang Kompas, *Wajah DPR dan DPD, 2009-2014 Latar Belakang Pendidikan Dan Karier*, Jakarta : Kompas Media Nusantara , 2010, hal. 283-342

Adapun H.Dudhie Makmun Murod, MBA Ketua Umum BMI tahun 2000-2005 dan melanjutkan 2005-2010 sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan DPP PDIP tahun 2005-2010 yang mana sudah menjabat anggota DPR RI dari PDIP sejak 1999-2009. Trimedy Panjaitan sebagai Ketua BMI tahun 2005-2010 menjabat anggota DPR-RI Dari PDIP sejak 1999-2009. Dan Syarif Bastaman sebagai Sekjen BMI tahun 2007-2010 juga menjabat sebagai DPR RI tahun 2009-2014<sup>13</sup>.

Partai politik merupakan sebuah instansi dan memiliki sifat yang representatif. Partai politik adalah sebuah perwakilan dari DPR maupun DPD yang berupa aspirasi dari masyarakat. Dalam UU, menyebutkan bahwa dalam proses pembentukan partai politik, partai diberikan kebebasan dalam mengatur pengurus maupun skema dari partai politik itu sendiri. Salah satu kebebasan dari partai politik adalah kebebasan dalam pembentukan organisasi sayap partai. Terdapat dua jenis pembentukan organisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Pembentukan organisasi sayap secara langsung dilakukan oleh organisasi masyarakat (ORMAS). Dalam pelaksanaannya ormas akan menyatakan diri secara sukarela dikarenakan adanya kesamaan ide maupun kesamaan dari visi misi antara ormas dan partai politik. Kaderisasi merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 283-342

mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Salah satunya pada kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan<sup>14</sup>.

Salah satu penelitian di Australia yang menganalisa eleksi politik lokal di Indonesia dan *trend* pentingnya menemukan bahwa setiap partai politik memiliki kelompok milisi atau satuan tugas. Ini terjadi di banyak partai politik, salah satunya yaitu kepemilikan PDIP terhadap BMI. Selama Pilkada berlangsung, BMI menampilkan wajah preman lokal dalam PILKADA, yang bahkan dianggap oleh sebagian pengamat sebagai fenomena baru, meskipun hal ini sudah terjadi sejak lama. BMI dan sayap partai lainnya muncul pada masa pasca kemerdekaan mengorganisir diri dalam berbagai kelompok milisi<sup>15</sup>.

Berdasarkan fakta sejarah ini kita dapat melihat bahwa rentang perjalanan PDI Perjuangan sebagai sebuah organisasi politik sangat panjang dan cukup berpengalaman. Dari segi epistemologi pemikiran dan konsep kebangsaan, partai ini dapat dianggap telah selesai, yakni dengan mendasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Konsepsi ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya sebagai *way of life* (jalan hidup) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Pratiwi, I., Rahayu, S., & Triyanto, T. Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. *Jurnal PPKN: Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 2020. Hal. 130-138.

<sup>15</sup> Sulistiyanto, P, *Local Elections and Local Politics in Indonesia: Emerging Trends*. Australia : *Journal of Asian Social Science Research* 2(2), hal. 157-158

<sup>16</sup> Yagkin Padjalangi, *Partai Milenial: Tantangan Baru PDI Perjuangan Di Era Digital*. Serpong : PT Semesta Merdeka Utama, 2019, hal. 182

Penting melihat sejauh mana konsepsi ideologis dan pengalaman masa lalu dalam mengisi maupun mewarnai dinamika perubahan berbangsa dan bernegara dapat berfungsi efektif menghadapi dinamika perubahan yang baru terjadi dalam satu dekade terakhir ini. Karenanya sangat urgen menjadikan nilai-nilai budaya, dan ideologi nasionalisme yang ditanamkan kuat oleh para pendiri partai PDI Perjuangan ini dapat tetap realibel dan *adaptable* terhadap nilai-nilai perubahan yang utamanya disebabkan oleh dinamika perkembangan informasi dan teknologi<sup>17</sup>.

Kemampuan PDI Perjuangan dalam mengelola berbagai aset intangibel (modal sosial) ini sebanding lurus dengan modal tangible yang dimilikinya. Dalam hal ini jaringan dan figur kader yang dimiliki oleh partai. Sebagai partai yang berdiri sejak Orde Baru, hingga kini PDI Perjuangan terbukti memiliki jaringan partai yang sangat kokoh dan solid dari pusat hingga ke daerah. Berbagai kadernya saat ini mulai dari yang duduk di legislatif hingga eksekutif baik di pusat maupun daerah menjadikan mesin partai mendapatkan dukungan dari berbagai sisi organisasi. Baik dari level birokrasi, organisasi sosial politik, hingga level penentu kebijakan menjadi bagian dari modal penting mesin partai PDI perjuangan ini berjalan secara efektif<sup>18</sup>.

Strategi pemenangan itu pun sejalan dengan cara-cara PDI Perjuangan dalam mengupayakan lahirnya kader-kader yang mumpuni. Untuk itu, taktik rekrutmen politik pada setiap calon kader harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, baik dari syarat pendaftarannya, tahap kaderisasinya, hingga pada tingkat penjenjangan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 182

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 199



karir politiknya di organisasi. Tiga hal ini mutlak diperhatikan bila menginginkan PDI Perjuangan betul-betul sebagai organisasi partai politik modern<sup>19</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan pemilihan calon akan menjadi sangat penting karena ketersediaan calon pemimpin lokal yang baik bervariasi antar daerah, dan antar partai. Partai politik sendiri harus meningkatkan kinerjanya dan membangun proses rekrutmen yang tepat sehingga dapat menemukan kandidat yang baik yang dapat menarik pemilih<sup>20</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PDI-P terlihat memang telah melaksanakan fungsi rekrutmen politik melalui organisasi sayap partai, namun hal yang lebih penting dari ini adalah *goals* yang mampu dipenuhi oleh PDI-P sebagai partai politik untuk mencetak aktor-aktor politik yang berkualitas dan mampu berperan penting dalam kemajuan demokrasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya partai dapat melakukan kegiatan internalisasi ideology bagi para calon kade sayap politik. Hal ini seperti yang telah dijelaskan akan memberikan pendidikan maupun pelatihan bagi para calon anggota maupun kader. Tujuan dari adanya pendidikan maupun pelatihan ini tidak lain untuk mendapatkan calon anggota sesuai yang diharapkan partai. Tentunya dengan hal tersebut memberikan manfaat bagi partai politik itu sendiri.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 200

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 158

Adapun, fungsi dari organisasi partai politik yaitu sayap partai adalah untuk memberikan peran dan fungsi bagi partai. Salah satu kegiatan yang terjadi pada organisasi yaitu kaderisasi. Kaderisasi memiliki beberapa fungsi dan peran diantaranya adalah sebagai sebuah persiapan bagi para kader partai politik, sebagai sistem karir dari partai politik, pendidikan bagi kader yang diberikan oleh partai dan merupakan sebuah regenerasi dari anggota terdahulu yang memiliki visi misi untuk memajukan organisasi dalam hal ini adalah organisasi partai.<sup>21</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini yaitu “Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melakukan Kaderisasi Untuk Pencalonan Anggota DPR RI Pada Legislatif 2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : “Bagaimana Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melakukan Kaderisasi Untuk Pencalonan Anggota DPR RI Pada Legislatif 2019”

---

<sup>21</sup> Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. *Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia*. SASI, 27(4), 2021, hal. 475-491.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan ini yaitu mengetahui Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melakukan Kaderisasi Untuk Pencalonan Anggota DPR RI Pada Legislatif 2019

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini yaitu :

- a. Mengidentifikasi peran partai PDIP-P dalam fungsi kaderisasi politik
- b. Mengidentifikasi pola kaderisasi Banteng Muda Indonesia
- c. Mengidentifikasi hubungan dari peran partai PDI-P dalam menempah kader melalui Banteng Muda Indonesia

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini dapat diimplementasikan oleh beberapa pihak yaitu :

- a. Pihak partai politik

Partai politik terutama PDI-P yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi analisis dalam hal mengembangkan kaderisasi politik dengan memiliki perhatian pada tujuan dan elektabilitas demokrasi di Indonesia untuk menjadikan PDI-P sebagai organisasi

partai politik modern yang mampu terus mengupayakan lahirnya kader-kader yang mumpuni.

b. Pihak organisasi sayap partai politik

Organisasi sayap partai politik dapat menggunakan referensi ini dalam mempelajari dan melakukan evaluasi dalam proses kaderisasi yang dibutuhkan dalam pola demokrasi Indonesia dan mengaktifkan partisipasi kader BMI

c. Pihak masyarakat

Masyarakat dalam mengimplementasikan tanggung jawab dan peran mengambil bagian dalam kontestasi politik di Indonesia dengan cara membangun kepercayaan terhadap proses kaderisasi dan partisipasi politik calon aktor politik Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini terdiri dari 5 Bab adalah sebagai berikut :

### a. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

### b. Bab II Tinjauan Teori

Berisi penelitian terdahulu yang relevan, konsep atau teori yang digunakan menjadi dasar pembahasan penulisan ini, yaitu Konsep Rekrutmen Politik, Konsep Kaderisasi dan Konsep Sayap Partai.

**c. Bab III Metodologi Penelitian**

Berisi uraian mengenai pendekatan penelitian, penentuan informasi, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

**d. Bab IV Gambaran Umum**

Berisi uraian gambaran umum objek penelitian.

**e. Bab IV Pembahasan**

Berisi mengenai pembahasan hasil penelitian meliputi peran partai PDIP-P dalam fungsi rekrutmen politik dan peran partai dalam Pencalonan Anggota DPR RI Pada Legislatif 2019.

**f. Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan.

